

KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TAMBANG DI KABUPATEN GOWA

Herman K¹, Muhlis Madani², Muchlas M. Tahir¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext. 107. Fax. 0411-8655888
hermanunismuh@yahoo.co.id, muchlas@unismuh.ac.id

² Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221
Telp. 0411-866972 ext. 107. Fax. 0411-8655888
muhlismadani@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to determine the communication of government in managing quarry class C in District Pallangga. The method used in this study is a qualitative description of the approach. Data collection techniques in this research is observation, interview and documentation. The results showed that: the communication of government in the management of quarry class C deemed to be lacking, it is reflected: informative communication or communication that aims to provide information to others about the management of quarry class C is still lacking; Persuasive communication or communication that aims to change attitudes, opinions, or other people's behavior regarding the management of quarry class C is still lacking. Factors that inhibit the communication of government in the management of quarry class C consists of; coordination, government assertiveness, control, public attitudes and awareness of the mine owners. While supporting factor is the government communications and public disclosure.

Keywords: government communication, mine management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi pemerintah dalam mengelola tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsi kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: komunikasi pemerintah dalam pengelolaan tambang galian golongan C dianggap masih kurang, hal ini tercermin dari: komunikasi informatif atau komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang; Komunikasi persuasif atau komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang. Faktor-faktor yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C terdiri dari; koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan, sikap masyarakat dan kesadaran pemilik tambang. Sedangkan faktor pendukung adalah komunikasi pemerintahan dan keterbukaan masyarakat.

Kata kunci: komunikasi pemerintah, pengelolaan tambang

A. PENDAHULUAN

Pemanfaatan potensi alam di setiap daerah dapat dilakukan untuk apa saja dan siapa saja, tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus ditaati dan disepakati. Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C yang berasal dari Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Di Desa ini bahan galian C tersebut semuanya di eksplorasi dan dikelola oleh pihak swasta. Pengelolaan oleh swasta tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah. Bagi yang berhubungan langsung dengan lokasi, seperti desa. Karena di lokasi galian C di daerah ini berada sangat dekat dengan permukiman masyarakat (desa), maka biasanya pihak pengelola memberikan kesempatan kepada masyarakat desa sekitar untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja kasar “pengumpul pasir” di tambang galian C tersebut.

Permasalahan yang paling pertama muncul dari pengelolaan galian C di daerah ini adalah kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut galian C tersebut dari lokasi tambang menuju ke “konsumen”. Hal ini disebabkan karena kapasitas jalan sebelum hadirnya galian C di daerah ini masih dilapisi dengan aspal kasar (bukan Hotmik) sehingga tidak mampu untuk menahan beban di atasnya yang setiap hari dilalui oleh truk-truk berbadan besar (Tonase muatan kendaraan tidak sebanding dengan Tonase kelas jalan) sehingga satu-satunya jalan menuju desa yang menjadi lokasi galian C tersebut rusak parah.

Permasalahan kedua yaitu ketersediaan bahan galian C merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak

bisa diperbaharui, maka permasalahan baru muncul.

Habisnya bahan galian C berupa tanah liat menyebabkan pihak pengelola tambang mulai melakukan ekspansi atau perluasan ke lahan-lahan yang ada disekitarnya yang memiliki potensi bahan galian di bawahnya. Hal ini sudah mulai terjadi, dimana masyarakat yang memiliki lahan disekitar lokasi tambang baik itu lahan pertanian pangan maupun perkebunan yang dibawahnya memiliki potensi bahan tambang maka pengelola tambang dengan berbagai trik rayuan berusaha untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan yang mayoritas adalah masyarakat kecil yang tidak berpendidikan agar mau “menjual” lahan mereka kepada pihak swasta atau pengelola tambang tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Komunikasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Tambang Galian Golongan C di Kecamatan Pallangga”.

B. KONSEP KOMUNIKASI PEMERINTAH

Komunikasi adalah keterampilan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dimana dapat kita lihat komunikasi dapat terjadi pada setiap gerak langkah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tergantung satu sama lain dan mandiri serta saling terkait dengan orang lain dilingkungannya. Satu-satunya alat untuk dapat berhubungan dengan orang lain dilingkungannya adalah komunikasi baik secara verbal maupun non verbal (bahasa tubuh dan isyarat yang banyak yang dimengerti oleh suku bangsa).

Menurut Effendy, bahwa “Istilah komunikasi atau bahasa Inggris *communication* berasal dari kata latin *Communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna” (Effendy, 2005:9). Dua orang yang terlibat

dalam komunikasi, misalnya dalam bentuk percakapan, belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Hal tersebut, sangat jelas bahwa kedua orang tersebut dapat dikatakan komunikatif apabila mengerti bahasa yang dipergunakan dan mengerti makna dari bahan dari bahan yang dipercakapkan.

Definisi komunikasi yang dikemukakan Erliana (2005:17), adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersamaan dan pertalian antara peserta dalam proses informasi. Komunikasi merupakan suatu proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersamaan hal ini dilakukan untuk memudahkan pengguna atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Erliana (2005: 18) mendefinisikan komunikasi sebagai proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi atau mengirim, menerima dan menanggapi pesan-pesan diantara orang-orang yang berinteraksi. Proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dalam kegiatan tersebut terjadi pertukaran informasi.

Dalam berkomunikasi ada beberapa faktor atau unsur yang perlu diperhatikan, antara lain: Siapa yang dihadapi; penerima pesan atau dengan siapa kita berbicara sangat berperan dalam berkomunikasi, hal itu bisa berhubungan dengan faktor usia, jenis kelamin, posisi atau jabatan, pendidikan, latar belakang budaya dan sebagainya.

Situasi dan kondisi; dalam situasi tertentu (formal, informal, situasi pekerjaan, santai dan sebagainya) akan berpengaruh dalam cara kita berkomunikasi, sehingga sedini mungkin kita dapat mengetahuinya dan menerapkan semua bentuk dan cara berkomunikasi pada segala situasi dan

kondisi, tanpa membuang waktu untuk penyesuaian.

Tempat; dimana kita berkomunikasi dengan seseorang juga berpengaruh terhadap cara kita berkomunikasi. Media yang digunakan; jenis media atau saluran komunikasi yang digunakan, apakah komunikasi tulisan, lisan, non verbal ataupun dengan menggunakan peralatan lainnya (misalnya telepon, faximilli, internet dan sebagainya) ikut berperan dalam tercapainya komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan; jenis pesan atau berita yang akan disampaikan (berita penting, sedih, gembira, teguran, formal, informal dan sebagainya). (Erliana, 2005:90)

1. Konsep Pengelolaan Tambang Galian Golongan C

Pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “an” yang merupakan kata kerja atau dapat juga diartikan sebagai mengerjakan sesuatu kegiatan atau dapat juga diidentikkan dengan istilah mengatur.

Poerwadarminta (1983: 27) mengemukakan pengertian pengelolaan yakni kelola atau mengelola adalah mengurus perusahaan pemerintah dan sebagainya, melakukan suatu pekerjaan, menyelenggarakan pekerjaan. Sedangkan pengelolaan adalah mengurus atau menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu.

Siagian (1985:6) memberikan pengertian pengelolaan sebagai ketatalaksanaan atau merupakan bagian dari fungsi manajemen yang dilaksanakan. Pengelolaan berhubungan erat dengan manajemen. Pengelolaan di sini mengandung pengertian tentang adanya suatu proses atau tahapan-tahapan kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan dalam suatu organisasi baik itu organisasi publik maupun organisasi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang akan ditetapkan dengan

menggunakan atau memakai orang lain, baik itu yang berasal dari organisasi itu sendiri maupun dari luar organisasi.

Selanjutnya penggolongan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu: (1) Bahan galian strategis; (2) Bahan galian vital; dan (3) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Penggolongan bahan galian ini adalah didasarkan kepada: (1) Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap Negara; (2) Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*); (3) Penggunaan bahan galian bagi industri; (4) Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak; (5) Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan; dan (6) Penyebaran pembangunan di daerah.

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian Negara. Dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan golongan bahan galian strategis. Bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, yaitu: (1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam; (2) Bitumen padat, aspal; (3) Antrasit, batu bara, batu bara muda; (4) Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya; (5) Nikel, kobal; dan (6) Timah.

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. bahan galian ini dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu: (1) Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu; (2) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit; (3) Yarosit, lausit, tawas, oker; (4) Batu permata, batu setengah permata; (5)

Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit; (6) Batu apung, tras, tanah diatome, tanah serap; (7) Marmer, batu tulis; (8) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsure mineral golongan a maupun b dalam jumlah yang banyak.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini berupaya untuk memahami bagaimana komunikasi pemerintah dalam pengelolaan tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penggunaan lebih dari satu pendekatan pengumpulan data mengizinkan evaluator menggabungkan kekuatan dan kebenaran dari suatu sumber data.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis.

Sumber data ini yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian sebagai salah satu sumber data yang urgen terhadap penelitian harus menggunakan teknik yang tepat. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah probability sampling. Yaitu suatu teknik penarikan informan yang digunakan apabila unsur-unsur yang ada dalam lokasi penelitian tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk ditarik/dipilih menjadi informan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan informan adalah merupakan cara yang digunakan dalam hal memperoleh data primer untuk bahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Tambang Galian Golongan C di Kecamatan Pallangga

Komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga diteliti melalui pendekatan kualitatif yang mengungkap berbagai fenomena secara naratif berdasarkan temuan-temuan di lokasi penelitian.

Komunikasi pemerintahan sebagai determinan dalam variabel penelitian ini difokuskan pada dua aspek, yaitu komunikasi informatif dan komunikasi persuasif. Komunikasi informatif adalah komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada warga Kecamatan Pallangga tentang pengelolaan tambang galian golongan C, sedangkan komunikasi persuasif adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain dalam melakukan pengelolaan tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga.

Komunikasi pemerintahan ini diwujudkan dalam bentuk penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat Kecamatan Pallangga, baik perusahaan/kelompok maupun perseorangan dalam pengelolaan tambang galian golongan C. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gowa (Dinas Pertambangan) berkedudukan sebagai komunikator (pemberi informasi) dan masyarakat Kecamatan Pallangga sebagai komunikan (penerima informasi), atau bisa juga sebaliknya, dalam keadaan tertentu masyarakat kecamatan Pallangga berada pada kedudukan sebagai komunikator dan pemerintah Kabupaten Gowa berada pada kedudukan sebagai komunikan.

Berikut wawancara dengan informan penelitian mengenai kedua bentuk komunikasi pemerintahan dalam

pengelolaan tambang galian golongan C, baik komunikasi informatif maupun komunikasi persuasif. Untuk lebih memperkuat kedua bentuk komunikasi tersebut peneliti melakukan beberapa wawancara seperti kutipan berikut ini.

"Iye ada tambang, ada beberapa tempat itu tapi desa yang berbeda, kayaknya empat tempat, ada di Desa Julukanaya, Desa Julubori, Desa Kampili siagang Desa Julupa'mai kutaeng, ada tambang pasir, ada untuk timbunan kalau mau orang bangun rumah" (wawancara MU)

Sesuai dengan kutipan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa di Kecamatan Pallangga terdapat beberapa lokasi penambangan golongan C, yang bahannya secara umum adalah untuk kebutuhan bahan dasar bangunan seperti pasir dan tanah timbunan. Komunikasi pemerintahan ini adalah mengenai keberadaan izin usaha dari kegiatan tambang galian golongan C.

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga dikategorikan tidak memiliki izin. Hal ini diperkuat oleh pengakuan seorang informan yang bekerja sebagai buruh tambang di salah satu tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga yang menyatakan bahwa:

"setahu saya, saya sudah bekerja di sini selama kurang lebih tiga tahun saya menganggap kalau tambang ini tidak berizin, karena terus terang, ketika ada tiba-tiba pemeriksaan dari Polisi Pamong Praja saya sering berlari dan sembunyi, nanti kalau pak Pamong Praja sudah pergi baru saya kembali bekerja" kita terpaksa lari karena disuruh sama yang punya tambang" (wawancara MU)

Pengakuan pekerja tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga sesuai dengan kutipan hasil wawancara di atas memperkuat hasil wawancara sebelumnya bahwa kegiatan penambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga tidak memiliki izin. Menghindarnya pekerja tambang jika ada pemeriksaan dari Polisi Pamong Praja adalah suatu fakta bahwa pemilik tambang memang belum dan tidak pernah mengajukan izin usaha penambangan, sehingga pekerja tambang galian golongan C diarahkan untuk menghindar saja ketika ada pemeriksaan tersebut.

Demikian halnya dengan pengakuan seorang tokoh masyarakat di salah satu lokasi tambang galian golongan C ketika dikonfirmasi tentang ada tidaknya izin usaha kegiatan tambang tersebut, dan menyatakan bahwa:

"...setahu saya dek, kegiatan penambangan galian golongan C di sana belum memiliki izin, jadi istilahnya masih illegal, kalau pemerintah bersikeras sesuai dengan penegakan aturan maka kegiatan tambang galian golongan C di tempat tersebut seharusnya belum beroperasi dan untuk sementara ditutup,, kalau penegakan aturan yang mau dijalankan nanti kalau sudah izin baru bisa dibuka". (wawancara NU)

Kutipan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keberadaan kegiatan penambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga masih illegal. Pengakuan tokoh masyarakat yang ada di lokasi tambang galian golongan C memberikan suatu fakta keberadaan tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga tidak memiliki izin. Hal ini sesuai dengan pengakuan kedua informan sebelumnya yang juga mengaku bahwa kegiatan tambang galian golongan

C di Kecamatan Pallangga tidak memiliki izin usaha.

Kegiatan tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga masih illegal. Sesuai dengan data yang diberikan informan bahwa kegiatan penambangan galian golongan C di tempat mereka masing-masing belum ada yang memiliki izin usaha.

Bahkan kegiatan penambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga tidak pernah ditindaki secara tegas. Adapun razia yang dilakukan oleh petugas Satpol Pamong Praja tidak memberikan dampak yang berarti bagi penambang untuk berhenti melakukan penambangan tetapi hanya terjadi penghentian sementara dan ketika Satpol Pamong praja sudah meninggalkan lokasi tambang, maka para pekerja tambang galian golongan C kembali melakukan kegiatan penambangan.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti terkait dengan komunikasi pemerintahan ini adalah mengenai sosialisasi pengelolaan tambang menyatakan:

"mengenai sosialisasi pengelolaan tambang galian golongan C, saya menganggap bahwa itu belum pernah dilakukan sama sekali, kenapa saya bilang demikian karena sampai saat ini saya belum pernah mendengar adanya sosialisasi kegiatan tambang galian golongan C, baik itu dari pak desa maupun dari pegawai lainnya". (wawancara MU)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sosialisasi kegiatan pertambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga belum pernah dilakukan. Seharusnya sosialisasi ini dilakukan ditempat-tempat umum dan peribadatan yang dianggap memudahkan masyarakat untuk menerima informasi pengelolaan tambang galian golongan C.

Ketidaktahuan warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya berpartisipasi dalam pengelolaan tambang bukan karena mereka tidak mau melakukannya tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa terhadap kegiatan penambangan. Demikian halnya dengan pengakuan seorang tokoh masyarakat di salah satu lokasi tambang galian golongan C ketika dikonfirmasi tentang ada tidaknya sosialisasi pengelolaan tambang galian golongan C, dan menyatakan bahwa:

“...setahu saya dek, kegiatan sosialisasi penambangan galian golongan C belum pernah ada, ye,,belum pernah dilakukan, biasanya kan kalau ada informasi penting seperti itu yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat, secara pribadi pasti saya dipanggil untuk ikut, kan saya biasa diikutsertakan dalam kegiatan di desa atau paling tidak pasti ada undangan untuk kami, tapi dalam hal penambangan ini belum pernah ada”. (wawancara NU)

Kutipan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keberadaan sosialisasi kegiatan penambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga tidak pernah dilakukan. Pengakuan tokoh masyarakat yang ada di lokasi tambang galian golongan C memberikan suatu fakta bahwa sosialisasi tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga tidak pernah dilakukan. Hal ini sesuai dengan pengakuan kedua informan sebelumnya yang juga mengaku bahwa kegiatan sosialisasi tentang tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga tidak pernah dilakukan.

Diperparah dengan sikap aparat desa terhadap kegiatan penambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga sangat lunak. Ketika

dikonfirmasi tentang alasan aparat desa bisa berbuat lunak terhadap kegiatan penambangan walaupun penambangan tersebut illegal karena tidak memiliki izin, informan terkesan tertutup dan tidak memberikan jawaban yang sebenarnya. Namun bagi penulis bahwa ketertutupan ini adalah suatu isyarat bahwa terjadi kolaborasi negatif antara penambang dengan oknum kepala desa yang keduanya masing-masing memperbesar simbiosis mutualisme dalam pengelolaan tambang galian golongan C. Di satu sisi kepala desa tidak dapat berbuat banyak terhadap penambangan karena dianggap memperoleh jasa dari penambangan, di sisi lain penambang merasa tenang melakukan penambangan walaupun ilegal karena mereka terlindungi dengan adanya jasa tersebut.

Wawancara selanjutnya yang dilakukan peneliti terkait dengan komunikasi pemerintahan ini adalah mengenai sikap camat terhadap tambang galian golongan C. Berikut kutipan hasil wawancara peneliti dengan informan tentang sikap camat terhadap tambang tersebut.

“mengenai sikap bapak camat terhadap tambang galian golongan C, saya menganggap bahwa hampir sama ji dengan sikapnya kepala desa, mereka sebenarnya tahu tetapi tidak mau naji berbuat tegas terhadap kegiatan penambangan tersebut, na gampang sekali ji sebenarnya kalau mau ditegasi, cuma kan tidak baik kalau saya yang sampaikan jangan sampai nabilang pak camat kuajari lagi begini-begini”. (wawancara MU)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga hampir sama dengan sikap kepala desa. Mereka

mengetahui adanya penambangan galian golongan C tetapi tidak mampu berbuat lebih jauh walaupun tambang tersebut tidak memiliki izin. Camat cenderung menganggap bahwa penambangan galian golongan C diserahkan tanggung jawab langsung kepada kepala desa yang berada di lokasi masing-masing apalagi kepala desa dapat setiap saat melakukan pengecekan langsung di lokasi penambangan.

Sikap camat Pallangga terhadap penambangan di Kecamatan Pallangga dianggap tidak merespon kegiatan walaupun camat Pallangga mengetahui bahwa kegiatan penambangan galian golongan C di wilayahnya tidak resmi atau tidak memiliki izin tambang. Camat Pallangga tidak dapat melakukan upaya yang dapat memberikan efek jera terhadap pelaku penambang liar atau mengusahakan proses penambangan legal sehingga penambangan tersebut dapat terkelola dengan baik, bukan hanya untuk pemenuhan bahan bangunan tetapi adalah untuk kemaslahatan bersama terutama masyarakat yang ada di sekitar wilayah penambangan.

Kepala desa maupun camat Pallangga cenderung melakukan pembiaran terhadap kegiatan penambangan liar di Kecamatan Pallangga. Ada kesan bahwa pak desa maupun camat Pallangga tidak mampu berbuat maksimal untuk memperlakukan penambang tersebut sebagai penambang liar secara hukum. Selain itu antara kepala desa dan camat Pallangga dianggap kurang melakukan komunikasi dalam melakukan pengawasan. Kepala desa menganggap bahwa dia sudah menyampaikan ke camat Pallangga sementara camat Pallangga menganggap itu adalah tanggung jawab teknis kepala desa karena berada di wilayahnya masing-masing.

Terlebih lagi sikap masyarakat terhadap kegiatan pertambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga

dianggap kurang aktif. Warga masyarakat menganggap permasalahan pertambangan galian golongan C cukup disampaikan kepada kepala desa saja sebagai pemerintah. Hal ini diperkuat oleh seorang informan yang menyatakan bahwa:

“kalau warga di sini tentu ada yang setuju, ada todong yang tidak setuju. Yang perlu di tahu bahwa pekerja tambang itu adalah warga disitu tonji,, ituji yang mereka kerja sehingga dapat ki uang, jadi tentumi yang bekerja pasti setuju tapi bagi yang lainnya ada todong yang tidak setuju”. (wawancara MU)

Hasil wawancara di atas memperkuat hasil wawancara sebelumnya bahwa sikap warga masyarakat terhadap penambangan kurang aktif. Dalam arti kata bahwa terjadi pro kontra antara warga yang satu dengan warga lainnya. Warga yang bekerja sebagai pekerja tambang bersikap menerima keberadaan tambang tetapi bagi mereka yang mendapatkan dampak negatif di sekitar lokasi tambang menganggap keberadaan penambangan itu harus ditutup.

Sikap warga masyarakat terhadap keberadaan galian golongan C memberikan dukungan sepenuhnya selama pengelolaan dilakukan dengan baik dan benar, apalagi pekerja tambang adalah masyarakat setempat yang dianggap membantu perekonomian keluarga. Permasalahan keberadaan tambang galian golongan yang belum memiliki izin tambang ini sudah pernah disampaikan kepada aparat pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa komunikasi yang terbangun di masyarakat adalah komunikasi dari warga masyarakat kepada pemerintah.

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan

yang di validasi dengan triangulasi menunjukkan bahwa permasalahan penelitian yang berfokus pada teknik komunikasi informatif atau komunikasi yang bertujuan untuk memberi tahu informasi kepada orang lain maupun teknik komunikasi persuasif atau komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain dianggap masih kurang.

Komunikasi informatif dianggap kurang karena komunikasi seharusnya dapat memberikan informasi tentang pengelolaan tambang kepada pemilik tambang, pekerja tambang dan warga setempat, namun kenyataannya komunikasi tidak terjadi. Demikian halnya dengan komunikasi persuasif atau komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain seharusnya dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku pemilik tambang, pekerja tambang dan warga setempat, namun kenyataannya komunikasi tidak terjadi.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Tambang Galian Golongan C di Kecamatan Pallangga

Komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan kurang komunikatif menunjukkan masih dominannya variabel penghambat dibandingkan dengan variabel pendukung. Oleh karena itu dalam uraian berikut ini akan dideskripsikan masing-masing variabel penghambat dan pendukung tersebut.

a. Faktor penghambat

Faktor-faktor yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C terdiri atas; koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan, sikap masyarakat dan kesadaran pemilik tambang tambang. Berikut akan

dideskripsikan masing-masing faktor penghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C.

1) Koordinasi Pemerintah

Koordinasi yang dimaksud di sini adalah koordinasi internal Pemerintah Kabupaten Gowa yaitu antara kepala desa, camat dan Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa. Kurang terbentuknya komunikasi dalam pengelolaan tambang galian golongan C adalah akibat dari miskomunikasi antara pemerintah di masing-masing level mulai dari level paling rendah dalam hal ini adalah kepala desa dan jajarannya, Camat Pallangga dan jajarannya maupun Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa.

2) Ketegasan Pemerintah

Hal mendasar yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C adalah kurangnya ketegasan pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Gowa, Camat Pallangga maupun kepala desa masing-masing lokasi penambangan galian golongan C. Tidak adanya ketegasan ini dianggap membentuk komunikasi yang kaku dalam pengelolaan tambang galian golongan C sehingga kegiatan penambangan berlangsung secara terus menerus walaupun tidak memiliki izin.

3) Pengawasan

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan tambang galian golongan baik lembaga eksekutif maupun legislatif (DPRD Kabupaten Gowa). Eksekutif dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Gowa (Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa), Camat Pallangga dan kepala desa lokasi tambang. Terhadap pengelolaan tambang galian golongan C baik eksekutif maupun legislatif kurang aktif melakukan pengawasan, bahkan diasumsikan bahwa terjadinya pembiaran penambangan galian golongan C di Kecamatan Pallangga karena adanya

kesepakatan tertentu antara pihak penambang dengan oknum kepala desa.

4) Sikap masyarakat

Sikap masyarakat yang dianggap menghambat komunikasi dalam pengelolaan tambang galian golongan C adalah sikap apatis masyarakat. Masyarakat lebih memilih berdiam di rumah daripada menyampaikan persoalan pengelolaan tambang galian golongan C yang tidak memiliki izin. Pemikiran masyarakat adalah kalau sudah pernah menyampaikan satu kali maka selanjutnya adalah tanggung jawab kepala desa.

5) Kesadaran Pemilik Tambang

Kesadaran pemilik tambang yang merupakan faktor penghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C adalah keinginan pemilik tambang dalam melakukan kewajibannya selaku pihak penambang, baik secara administratif maupun secara teknis. Secara administratif pihak penambang seharusnya melakukan permohonan izin tambang dan memenuhi segala hal yang menyangkut pengelolaan tambang galian golongan C sebelum melakukan penambangan. Secara teknis pemilik tambang harus memenuhi hak pekerja tambang dan pemeliharaan lingkungan lokasi penambangan agar pemukiman di daerah sekitar tambang tidak memperoleh dampak dari penambangan galian golongan C.

b. Faktor Pendukung

Faktor pendukung komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat. Berikut masing-masing dari faktor pendukung.

1) Sikap Penambang

Sikap penambang yang dimaksud di sini adalah ketersediaan penambang dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan tambang galian golongan C.

Penambang pada umumnya secara terbuka menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manapun sepanjang tidak merugikan pihak penambang itu sendiri.

2) Keterbukaan Masyarakat

Keterbukaan masyarakat di Kecamatan Pallangga adalah merupakan suatu hal yang mendukung terbentuknya komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C. Walaupun pada dasarnya warga memilih pasif dalam mengkomunikasikan pengelolaan tambang galian golongan C tetapi mereka dapat terbuka menerima keberadaan tambang galian golongan C tersebut.

Komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C dapat dilakukan dengan baik apabila masyarakat dapat melakukan komunikasi secara terbuka dan tidak terikat oleh desakan dari pihak manapun termasuk dari pemilik tambang maupun kepala desa.

E. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dianggap masih kurang. Hal ini terindikasi dari beberapa item pertanyaan yang diberikan kepada informan yang pada menyatakan bahwa: (1) Komunikasi informatif atau komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang; (2) Komunikasi persuasif atau komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku orang lain tentang pengelolaan tambang galian golongan C masih kurang.

2. Komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C di Kecamatan Pallangga masih didominasi variabel penghambat dibandingkan dengan variabel pendukung. Faktor-faktor yang menghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C terdiri atas; koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan, sikap masyarakat dan kesadaran pemilik tambang. Sedangkan faktor-faktor pendukung komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat.

Dengan memperhatikan kesimpulan di atas dan menganalisa hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis merasa perlu memberikan saran sebagai berikut :

1. Bupati Gowa agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa terutama dalam hal pengelolaan tambang galian golongan C.
2. Dinas Pertambangan Kabupaten Gowa agar meningkatkan intensitas pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan tambang galian golongan C di wilayah kecamatan Pallangga dan Kabupaten Gowa secara umum.
3. Camat Pallangga dan Kepala Desa Lokasi Penambangan agar : (a) membentuk komunikasi intern diantara mereka dan dengan para warga masyarakat agar pengelolaan tambang galian golongan C lebih bertanggung jawab, (b) mengajak pemilik tambang agar dapat memenuhi kewajibannya sebagai pemilik tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2009. *Sosiologi Komunikasi*. Kencana. Jakarta.
- DS, Betty. 2007. *Komunikasi yang Efektif*. Depdiknas. Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 1992. *Dinamika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Effendy, Onong Uchjana. 2000. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hasan, Erliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Aditama. Jakarta.
- HS, Salim. 2010. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosdakarya. Bandung.
- Nasution, Zulkarimen, 2002. *Komunikasi Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi; Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Poerwadarminta. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 1993. *Teori Komunikasi*. UT. Jakarta.
- Setyobroto, Sudiby. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Universitas Negeri Jakarta. Jakarta.
- Siagian, Sondang p. 1985. *Filsafat administrasi*. Masagun. Jakarta.

Subiakto, Henry dan Rachmah Ida. 2012.
Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi. Kencana. Jakarta.

Soewargono, Prawirohardjo. 1993.
Identitas Ilmu Pemerintahan. IIP. Jakarta.

Susanto, Astrid. 1992. *Filsafat Komunikasi*. Bina Aksara. Jakarta.

Dokumen :

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 10 tahun 2003 Tentang
Retribusi Izin Pertambangan dan
Energi Daerah